

## TESIS

DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA  
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL  
378 KUHP DI PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH  
(Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2017/Pn.Spn)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu  
Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum*

*Universitas Andalas*

Dosen pembimbing

**Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H.**

**Dr. Yoserwan, S.H.,M.H.,LL.M**

Oleh :  
Edo Pahmi Sandoyo, S.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA  
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378  
KUHP DI PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH  
(Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2017/Pn.Sp)**

**Edo Pahmi Sandoyo, Nim 1820112037, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 101 Halaman.**

**Abstrak**

Berdasarkan asas penafsiran hukum (*lex specialis derogat legi generalis*) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum serta ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP apabila ada aturan hukum yang khusus maka aturan hukum yang umum dikesampingkan, namun dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik atau dikenal juga dengan penipuan online penuntut umum menerapkan Pasal 378 KUHP dan tidak menerapkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*lex specialis*) terhadap terdakwa Pengki Ariska alias Pengki bin Elmayadi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Sp dan dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntutperkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Sp. metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung juga yuridis empiris karena disini penulis melakukan penelitian hukum terhadap perkara pidana putusan (No:89/Pid.B/2017/N.Sp). jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: penuntut umum mempertimbangan alat-alat bukti, fakta persidangan, kronologi kasus tindak pidana, serta berkas perkara yang dari awal telah disangkakan oleh penyidik dengan menerapkan Pasal 378 KUHPserta Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 378 KUHP tersebut. tuntutan yang diajukan penuntut umum dengan menggunakan pasal 378 KUHP sebenarnya merupakan hal yang keliru dan tidak sesuai karena sudah ada peraturan yang khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum sebaiknya melihat aturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur hal yang sama dengan perbuatan yang dilakukan agar suatu dakwaan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain yang mengatur hal yang sama dan Sebaiknya penuntut umum lebih memperhatikan aturan yang khusus dengan mengesampingkan aturan yang umum sebagaimana azas (*lex specialis derogat legi generalis*) dikarenakan tindak pidana penipuan online diatur di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, agar tercapainya tujuan hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci : Pertimbangan Penuntut Umum, Tindak Pidana, Tindak Penipuan,  
Penipuan Online.**

**PROSECUTIONS OF THE PUBLIC PROSECUTORS DEMANDING ONLINE  
CRIMINAL ACTION OF FRAUD BY IMPLEMENTING ARTICLE 378 KUHP IN  
DISTRICT COURT CITY OF SUNGAI PENUH**

**(Decision Study Number: 89 / Pid.B / 2017 / Pn.Spn)**

**Edo Pahmi Sandoyo, Nim 1820112037, Master of Law Study Program, Postgraduate  
Faculty of Law, Andalas University, 2020, 101 pages.**

**Abstract**

Based on the principle of legal interpretation (*lex specialist derogat legi generalis*) which states that specific laws override general laws and the provisions of Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Code if there are specific legal rules then general legal rules are disregarded, but in cases of fraud with using electronic transaction facilities or also known as online fraud, the public prosecutor applied Article 378 of the Criminal Code and did not apply Article 45A paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (*lex specialis*) against the accused Pengki Ariska alias Pengki bin Elmayadi. The problem of this research is how to prove the public prosecutor in prosecuting online fraud by applying Article 378 of the Criminal Code in Decision Number 89 / Pid.B / 2017 / Pn.Spn and the basis for the Public Prosecutor's consideration in prosecuting cases of online fraud by applying Article 378 KUHP in Decision Number 89 / Pid.B / 2017 / Pn.Spn. the research method is carried out with a normative juridical approach and is also supported by empirical juridical because here the authors conduct legal research on criminal cases decisions (No: 89 / Pid.B / 2017 / N.Spn). ype of data using primary data and secondary data. Data analysis using qualitative analysis. The results of the research and discussion can be concluded that: the public prosecutor considers the evidence, trial facts, chronology of criminal cases, and case files that investigators have suspected from the beginning by applying Article 378 of the Criminal Code and the Public Prosecutor believes that the defendant's actions have fulfilled the following elements. elements that are in Article 378 of the Criminal Code. The prosecution's claim using article 378 of the Criminal Code is actually wrong and inappropriate because there is already a special regulation (*lex specialist*), namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The suggestion in this research is that the public prosecutor should look at the relevant laws and regulations that regulate the same thing as the act committed so that an indictment does not conflict with other laws that regulate the same thing and the public prosecutor should pay more attention to specific rules with overriding general rules as well as the principle (*lex specialist derogat legi generalis*) because online fraud is regulated in the law on electronic information and transactions, in order to create legal objectives and no party will feel disadvantaged.

**Keywords: Consideration Of Public Prosecutors, Criminal Act, Act Of Fraud,  
` Online Fraud**